



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 90 TAHUN 2021**

TENTANG


**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

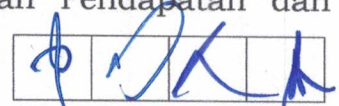
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

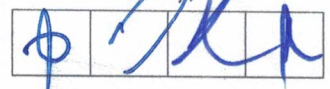
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan



- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 778.824.778.643,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

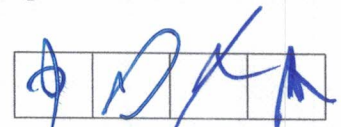


Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
 - (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 21.955.928.495,- (*Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.757.208.535,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 12.046.880.981,- (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 28.323.586.690,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 63.000.000,- (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 688.252.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 11.600.000,- (*Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 216.422.500,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar 3.750.000.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - f. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 13.226.653.995,- (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 506.145.000,- (*Lima Ratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 877.563.535,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); dan



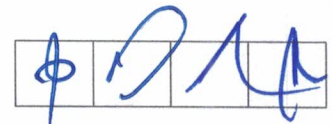
- c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 1.373.500.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 12.046.880.981,- (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
- b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*);
- c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.401.486.995,- (*Satu Milyar Empat Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
- d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.524.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh empat Ribu Rupiah*);
- e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 17.323.984.195,- (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*); dan
- f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 3.594.277.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 690.264.555.900,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 624.544.097.900,- (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 0 ,- ; dan
- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 65.720.458.000,- (*Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:



Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*);

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 891.365.283.903,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 551.110.068.587,- (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial
 - e. belanja bunga; dan
 - f. belanja subsidi.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 296.128.565.018,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Belas Rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 200.009.535.595,- (*Dua Ratus Milyar Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.429.929.027,- (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.542.038.947,- (*Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 10

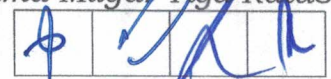
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;



- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 186.081.308.970,- (*Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 68.300.488.153,- (*Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 29.252.420.811,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.674.882.858,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 222.149.226,- (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,- (*Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 33.653.583.273,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 91.777.914.901,- (*Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.713.999.122,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 35.344.757.952,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus*



Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.856.942.900,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 12


- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
 - belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 45.986.645.032,- (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.666.630.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
- belanja bantuan sosial kepada individu;
 - belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.191.850.000,- (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 171.188.947,- (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 214.993.831.820,- (*Dua Ratus Empat Belas Milyar*



Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.177.891.640,- (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.365.705.851,- (*Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.68.302.306.978,- (*Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 98.210.690.500,- (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 937.236.851,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 15

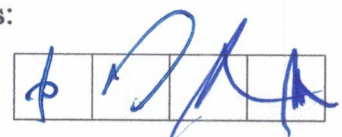
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.760.200.593,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 117.501.182.903,- (*Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.471.313.703,- (*Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 115.029.869.200,- (*Seratus Lima Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:



- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp. 123.408.505.260,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.868.000.000,- (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-



- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-

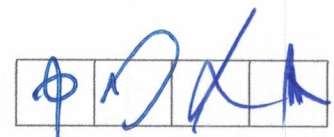
Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (112.540.505.260,-) (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 112.540.505.260,- (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang Dilasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- h. Lampiran VIII Rincian Sumber Daya Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.



Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

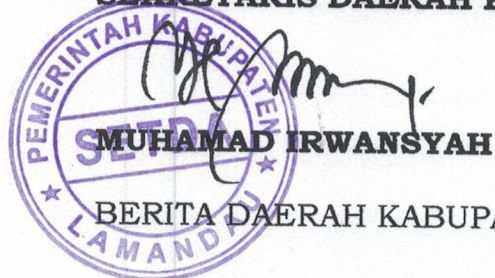
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2021



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 803

LAMPIRAN I

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG
DILASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMIYAAAN**

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.083.604.701
4.1.01	Pajak Daerah	21.955.928.495
4.1.01.06	Pajak Hotel	63.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	20.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	20.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	29.800.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	29.800.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.200.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.200.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	688.252.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	57.600.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	57.600.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	19.252.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	19.252.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	491.400.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	491.400.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	11.600.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	480.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	480.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.120.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.120.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	216.422.500
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	172.406.520
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	172.406.520
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.015.980
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	40.015.980
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.750.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.750.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.750.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	81.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	81.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	93.600.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	93.600.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	42.680.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	42.680.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	132.720.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	132.720.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.226.653.995
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.726.653.995
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.726.653.995

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02	Retribusi Daerah	2.757.208.535
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	506.145.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	56.600.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	56.600.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	126.545.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	126.545.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	877.563.535
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	444.933.535
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	368.343.535
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	33.400.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	33.890.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	7.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1.800.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	67.270.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	67.270.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	18.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	18.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.860.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.860.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	332.500.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	25.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	257.500.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.373.500.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	273.500.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	273.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.100.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.100.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.046.880.981
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.046.880.981
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.046.880.981
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.046.880.981
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.323.586.690
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.401.486.995
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	100.000
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	100.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.290.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.290.000
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.321.796.995
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	18.592.250
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.303.204.745
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.524.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	129.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	129.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.395.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	195.000
4.1.04.13.02.0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.200.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	17.323.984.195
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	17.323.984.195
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	17.323.984.195
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.594.277.000
4.1.04.20.01	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.594.277.000
4.1.04.20.01.0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.594.277.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.314.500
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.314.500
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.314.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	713.741.173.942
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.264.555.900
4.2.01.01	Dana Perimbangan	624.544.097.900
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.920.263.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	21.567.793.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.684.379.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	196.378.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	33.025.635.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.527.252.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	420.223.849.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	420.223.849.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.319.659.640
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.353.780.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.351.217.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.726.544.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.336.311.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	18.987.343.500
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.006.685.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.077.806.140
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	810.818.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	673.036.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	796.937.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.859.518.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.807.299.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.532.365.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.080.326.260
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.350.450.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	25.606.732.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.062.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.825.646.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.635.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	385.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.718.423.260
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	9.341.706.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	169.919.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.063.418.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	421.832.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	596.800.000
4.2.01.05	Dana Desa	65.720.458.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	65.720.458.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	65.720.458.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.476.618.042
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.476.618.042

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK. SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.476.618.042
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.476.618.042
	Jumlah Pendapatan	778.824.778.643
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	551.110.068.587
5.1.01	Belanja Pegawai	296.128.565.018
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	136.081.308.970
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	134.536.516.171
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	134.333.331.371
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	203.184.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.463.445.944
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.441.645.032
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21.800.912
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.700.266.428
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.700.266.428
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.862.539.334
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.827.259.334
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35.280.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.501.240.235
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.501.240.235
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.243.810.563
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.227.588.483
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.222.080
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.841.377.613
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.840.069.957
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.307.656
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.985.517
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.981.807
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.710
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.513.342.689
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.513.342.689
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	588.138.476
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	588.138.476
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	1.825.646.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	1.825.646.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.300.488.153
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	61.575.628.117
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	61.477.078.117
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	98.550.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.288.311.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.288.311.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.436.549.036
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.436.549.036
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.252.420.811
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.115.775.425
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	251.855.225
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	200.455.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	663.465.200
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	56.410.635
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.700.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	302.250
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.310.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.210.008
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	18.650.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	743.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	13.075.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	420.377
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25.606.732.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	25.606.732.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.062.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.062.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	573.952.751
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	573.952.751
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	837.550.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	837.550.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.674.882.858
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.061.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.061.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.916.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.916.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.450
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.450
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.489.128
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.489.128
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.763.953.280
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.763.953.280
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.162.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.162.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	222.149.226
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.580.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.580.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.080.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.080.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.332.400
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.332.400
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	256.826
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	256.826
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.500.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.500.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	6.300.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	6.300.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.300.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.300.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	4.200.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	995.715.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	995.715.000
5.1.01.99.99.99999	Belanja Pegawai BLUD	995.715.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.009.535.595
5.1.02.01	Belanja Barang	33.653.583.273
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.635.176.450
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	182.495.709
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	367.473.854
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.480.927.935
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	460.109.609
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	33.247.500
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	131.631.431
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.115.939.706
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	825.195.500
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	45.016.300
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	97.112.353
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	11.975.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.279.140.481
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.095.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.313.964.378
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	331.339.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	305.307.721
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.200.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	39.578.050
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	612.072.716
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.758.726.453
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	361.066.484
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	678.056.520
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.801.042.762
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.812.579.710
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	54.813.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	154.970.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.031.154.354
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.645.339.574
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	163.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	854.438
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	402.415.884
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	160.546.125
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.310.775
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	107.887.908
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.995.860
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.576.250
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	532.909.250
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.039.389.500
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	184.219.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	26.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.406.823
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	18.406.823
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.777.914.901
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.333.201.963
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.609.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.159.346.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	540.482.500
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	540.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.983.792.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.501.782.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	200.402.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	127.923.075
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.436.652.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	572.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.572.812.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	9.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	42.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	141.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.408.727.680
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	462.432.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	62.064.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	866.741.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.021.484.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.044.448.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.160.848.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	317.856.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	11.767.925
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	21.214.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	460.688.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	70.357.251
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	805.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	56.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14.750.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	90.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	139.830.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.550.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	84.290.850
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	320.320.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	369.254.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	639.995.100
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.973.726.588
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.296.533.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.099.432.594
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	18.375.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	799.620.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11.601.041.625
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.561.558.880
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.745.323.404
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	234.516.264
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	59.643.077
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	948.415.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	172.900.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	124.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	205.300.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	207.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	114.165.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	78.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	37.050.000
5.1.02.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	10.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	874.751.596
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	153.149.204
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	9.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	49.018.392
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	658.084.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.700.000
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	2.700.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	89.000.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	87.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.274.761.338
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	15.299.788
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	500.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	138.300.350
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	116.500.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	107.661.200
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	397.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	378.097.379
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	15.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	125.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	120.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	76.097.379
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.080.900.000
5.1.02.02.10.0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	4.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	851.900.000
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	165.000.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	60.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	499.200.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	142.400.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	356.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.695.846.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	396.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.409.225.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.588.100.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.302.521.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.713.999.122
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.569.121.483
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	5.350.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	4.500.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	55.700.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.686.506.500
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000
5.1.02.03.02.0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	847.560
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	138.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	32.566.354
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	10.278.346
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	12.120.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	200.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	65.036.780
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.228.797
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	319.205.532
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	10.500.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	208.368.567
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	450.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	170.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	531.440.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.153.047
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	232.530.000
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	3.640.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	68.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.385.947.639
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.461.462.025
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	31.987.600

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.472.186.700
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	420.311.314
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	758.930.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	377.800.000
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	150.000.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	131.130.000
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	35.344.757.952
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.344.757.952
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.513.116.232
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.062.004.841
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.416.772.064
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63.560.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.289.304.815
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.856.942.900
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.241.900
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.241.900
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	507.600.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	112.400.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	360.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.856.701.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.650.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	206.701.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.422.163.784
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.422.163.784
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.422.163.784
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.240.173.663
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.240.173.663
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.240.173.663
5.1.05	Belanja Hibah	50.429.929.027
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.986.645.032
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.492.590.472
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.022.715.851
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.391.874.621
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	78.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.032.224.034
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.009.287.273
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.637.936.761
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	385.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	461.830.526
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	74.500.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	387.330.526
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.666.630.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	230.400.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	230.400.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.436.230.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.436.230.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.542.038.947
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.191.850.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.924.600.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.924.600.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	267.250.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	267.250.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	171.188.947
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	171.188.947
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	171.188.947
5.2	BELANJA MODAL	214.993.831.820
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.177.891.640
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.177.891.640
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.172.891.640
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	1.172.891.640
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.365.705.851
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.473.568.500
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	814.000.000
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	800.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	14.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	659.568.500
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	750.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	51.566.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	28.970.000
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	210.430.000
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	7.390.000
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	194.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	166.462.500
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.609.500.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.602.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.502.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.295.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.330.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	42.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.833.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.600.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.500.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	7.500.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	155.779.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	57.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	57.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	38.000.000
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	38.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	60.779.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	26.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	24.729.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	10.050.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	66.090.218
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	66.090.218
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	32.300.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	30.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	3.790.218
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.098.142.379
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.255.305.513

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.066.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	108.696.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.132.543.013
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.431.434.236
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.278.539.036
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	107.635.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	252.627.800
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	55.430.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	639.202.400
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	96.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	411.402.630
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	332.020.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	22.138.750
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.500.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	55.743.880
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	433.320.596
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	301.221.506
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.207.618
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.688.583
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	87.835.644
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	125.370.300
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.119.361
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	126.599.090
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	91.000.000
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	18.599.090
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	17.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.500.000
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	5.500.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.307.935.640
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.032.143.500
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.717.250.420
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.325.986.025
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	4.988.907.055
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.275.792.140
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.275.792.140
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	493.083.700
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.805.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	4.305.000
5.2.02.08.01.0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	3.500.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	6.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	474.468.700
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	29.715.000
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	153.930.000
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	555.000
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	899.200
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	11.227.500
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	7.000.000
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	27.492.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	243.650.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.810.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.400.000
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	3.410.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.742.596.786
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.599.908.524
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	320.719.516
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.548.335.953
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	730.853.055
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.142.688.262

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022


Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	3.500.000
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	14.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.110.529.490
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	176.944.658
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	837.714.114
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.953.500
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	49.953.500
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	49.953.500
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	140.000.000
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	140.000.000
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	140.000.000
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	152.100.000
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	152.100.000
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	152.100.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	370.000.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	245.000.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	45.000.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	150.000.000
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	50.000.000
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	125.000.000
5.2.02.15.04.0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	125.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	181.040.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	181.040.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	181.040.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	3.000.000
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	1.500.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.088.095.532
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.088.095.532
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.088.095.532
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.302.306.978
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	68.302.306.978
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.182.306.978
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	55.079.597.418
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	400.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.690.256.350
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	400.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	300.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.360.911.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	150.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	278.200.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.672.355.065
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	250.987.145
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.120.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	120.000.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.000.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.210.690.500
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	89.901.690.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	69.768.100.500
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	69.468.100.500
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	300.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	20.133.590.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	900.000.000

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	19.233.590.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.708.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	329.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	329.000.000
5.2.04.02.04 *	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.129.000.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.129.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.100.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.100.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	150.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	150.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	116.000.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	116.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	116.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	485.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	485.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	485.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	937.236.851
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	728.658.812
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	699.220.411
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	538.496.811
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	14.946.600
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	40.060.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	36.176.400
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	8.947.600
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	3.078.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	940.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	56.575.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	27.233.501
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	27.233.501
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	2.204.900
5.2.05.01.03.0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	704.900
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	1.500.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	128.578.039
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	83.430.539
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	22.420.109
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	61.010.430
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	45.147.500
5.2.05.02.02.0001	Belanja Modal Pahatan	20.000.000
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	8.340.000
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	3.307.500
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	13.500.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	80.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.760.200.593
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.760.200.593
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.760.200.593
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.760.200.593
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.760.200.593
5.4	BELANJA TRANSFER	117.501.182.903
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.471.313.703
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.471.313.703
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.471.313.703
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.471.313.703
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.029.869.200
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	114.784.869.200

KABUPATEN LAMANDAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	114.734.869.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	114.734.869.200
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000
	Jumlah Belanja	891.365.283.903
	Total Surplus/(Defisit)	(112.540.505.260)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.408.505.260
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.583.051.377
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.583.051.377
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	48.583.051.377
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	74.825.453.883
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	74.825.453.883
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	74.825.453.883
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	123.408.505.260
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.868.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.868.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.868.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.868.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.868.000.000
	Pembiayaan Netto	112.540.505.260

Bupati Lamandau

HENDRA LISMANA

